BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional dimana dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan dianggap penting dalam rangka untuk menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa, selain itu untuk mencakupi kebutuhan masing-masing bangsa yang melakukan kerjasama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, membina dan menegakkan perdamaian serta ketertiban dunia. Jika suatu negara yang tidak melakukan hubungan internasional dengan negara lain maka akan terkucilkan dalam pergaulan dunia, dan yang berakibat pada negara tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dari negaranya.

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang namanya kerjasama internasional. Dimana dalam suatu kerjasama internasional tedapat berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Yang menjadi hal paling utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan dari sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung dari konsep kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Salah satu isu penting dalam hubungan internasional adalah masalah ekonomi dan perdagangan. Dimana ekonomi dan perdagangan telah menjadi isu

yang senantiasa menarik karena dampaknya bagi umat manusia didunia, hal ini terjadi tidak saja pada masyarakat negara maju akan tetapi terjadi juga pada masyarakat negara berkembang. Maka dari itu untuk menunjang perekonomian suatu negara dibutuhkan bantuan dari negara lain dimana dengan dilakukannya kerjasama internasional tersebut dapat membantu suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional yang merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi. dimana kerjasama ekonomi ini dapat membantu negara yang kekurangan sumber daya alam dan dapat terpenuhi karena hal ini. Melakukan kerjasama ekonomi internasional yang menjadikan faktor terpenting terjadinya hal tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam, dan setiap negara memiliki sumberdaya alam yang berbeda-beda baik dalam kualitas maupun kuantitas bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut karena teknologi yang dimiliki oleh setiap negara yang berbeda (Tunggal, 2013:35).

Seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan dengan banyaknya wilayah laut pesisir serta pulau-pulau kecil yang luas yang dimiliki oleh Indonesia dan membuat Indonesia memiliki makna yang strategis sebagai sebuah pilar ekonomi nasional. Selain nilai ekonomis yang dimiliki oleh Indonesia, dimana sumber daya alam yang melimpah terutama sumber daya kelautan yang mempunyai nilai ekologis, disamping itu dengan kondisi geografis yang dimiliki Indonesia terletak pada geopolitik dan strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Karena hal tersebut yang membuat geo-ekonomi

dan geo politik yang menjadikan sektor kelautan sebagai sebuah sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional untuk Indonesia (http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/ diakses pada 16 Maret 2017).

Dengan laut yang dimiliki oleh Indonesia yang begitu luas dan memiliki berbagai sumber daya ikan di dalamnya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang dari pantai Indonesia mencapai 95.181 km. Selain itu Indonesia memiliki luas laut 5,4 juta km^2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km^2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Dengan luas laut yang dimiliki Indonesia setimpa juga dengan potensi hasil laut yang terkandung di dalamnya (http://presidenri.go.id/maritim/menakar-potensi-budidaya-laut.html diakses pada 16 Maret 2017).

Saat ini pembangunan di sektor perikanan menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia, dan perhatian tersebut diimplementasikan melalui dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pemerintah sendiri tidak lupa melakukan perawatan terhadap lingkungan ekosistem yang ada di dalam laut, Indonesia sendiri (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/sektor_perikanan_060314.pdf di akses pada 23 Maret 2017).

Banyaknya sumber daya perikanan yang melipah dimiliki Indonesia yang dapat menjadikan sumber perikanan sebagai pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor perikanan dapat dikatakan sebagai sektor unggulan yang sebagaimana mestinya mampu bersaing dengan negara-negara perikanan maju lainnya, hal tersebut dapat dikatakan karena perikanan Indonesia yang mengalami peningkatan, selain itu dalam melakukan pengelolaan dan pembudidayaan yang dilakukan oleh Indonesia dengan baik. Dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan perikanan Indonesia adapun beberapa negara yang belajar dari apa yang dilakukan oleh Indonesia, salah satunya adalah Sudan.

Sudan merupakan negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian, Sudan merupakan negara terluas di Afrika dan di daerah Arab, serta terluas kesepuluh di dunia. Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Kongo dan Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut. Sudan juga terletak dijalur pertemuan antara dua sungai Nil, yaitu Nil putih dan Nil Biru (http://www.kemlu.go.id/khartoum/lc/Pages/Sudan.aspx di akses pada 25 Mei 2017).

Sudan adalah salah satu negara terbesar di Afrika dengan luas 1.861.500 km². Kontribusi perikanan terhadap PDB terbilang jumlahnya kecil. Namun, Sudan dikaruniai sumber daya air dan lahan yang dapat mendukung perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang kuat. Produksi perikanan tangkap Sudan diperkirakan sekitar 34.000 ton pada tahun 2012, hal tersebut di dapat dengan 29.000 ton dari tangkapan air di pedalaman dan 5.000 dari tangkapan laut. Sektor

akuakultur masih baru mulai dan produksi tahunan diperkirakan mencapai 2.000 ton pada tahun 2012. Kegiatan perikanan tangkap berpusat di sekitar Sungai Nil dan anak-anak sungainya, dataran banjir musiman dan empat waduk besar serta perairan teritorial Sudan di Laut Merah. Kultur ikan air tawar terutama didasarkan pada budidaya kolam ikan nil (http://www.fao.org/fishery/facp/SDN/en di akses pada 25 Mei 2017).

Hubungan bilateral pemerintah Indonesia dengan Sudan sudah cukup lama terjalin. Terutama dalam bidang kelautan dan perikanan, Sudan sangat tertarik belajar budidaya perikanan dari Indonesia. Bahkan, negara yang terletak di timur laut benua Afrika ini, sudah beberapa kali mengirimkan pembudidaya untuk secara khusus mengikuti pelatihan akuakultur di Indonesia. Pelatihan perikanan budidaya dinilai sangat penting bagi Sudan yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Untuk ikan tawar, Sudan merupakan negara terluas yang dilewati Sungai Nil yang mempunyai potensi kekayaan ikan yang cukup besar, tetapi belum dikelola secara maksimal.

Untuk mengembangkan sektor perikanan dan pembudidayaan serta meningkatkan perekonomian antara Indonesia dan Sudan maka, kedua negara telah melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan, yang di tandatangani pada 24 Maret 2007 dan di tandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menjabat saat itu yaitu Freddy Numberi dan oleh Menteri Sumberdaya Hewan dan Perikanan Republik Sudan yaitu Galwak

Deng Garang (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3539_SDN-2007-0015.pdf di akses pada 25 Mei 2017).

Dalam kerjasama antara Indonesia dan Sudan ini, dimana Indonesia mendukung Sudan dalam pengembangan perikanan melalui pengiriman ahli perikanan akuakultur, pengolahan ikan, pemasaran dan pengelolaan ikan, pengembangan sumber daya manusia dan penilaian stok untuk meningkatkan perikanan dan budidaya Sudan. Karena hal tersebut merupakan kepentingan dari Sudan sendiri untuk mengembangkan perikanan di negaranya dengan bantuan dari Indonesia berupa pelatihan dalam pengelolaan dan pembudidayaan perikanan.

Dalam kerjasama yang dilakukan antara Sudan dan Indonesia tentang kelautan dan perikanan tahun 2007 dimana Indonesia memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sudan dibidang perikanan. Selain itu Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengirimkan tim ahli budidaya perikanan (*aqualculture*) ke Sudan untuk diikutsertakan dalam pelatihan *Training of Trainers* (*ToT*) dan manajemen perikanan di beberapa pusat budidaya ikan di Indonesia (http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia---Sudan Meningkatkan-Kerjasama-Sektor-Perikanan.aspx di akses pada 25 Mei 2017).

Dengan diadakan kerjasama ini Indonesia melakukan dan membuat acara pelatihan untuk Sudan. Bahkan beberapa acara training yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudan sangat konsen mengirimkan warganya. Di antaranya, pada acara *International Training Program for Asia and African Countries on Grouper Breeding and Rearing* yang dilaksanakan 27 Mei

sampai dengan 6 Juni 2009 di Balai Budidaya Air Payau Sitobondo (http://www.neraca.co.id/article/30361/kerjasama-ekonomi-bilateral-sudan-berguru-budidaya-perikanan-ke-indonesia di akses pada 25 Mei 2017).

Pada tahun 2010 warga Sudan yang mempunyai usaha dibidang perikanan melakukan praktik lapangan di kota Pekalongan dengan jumlah peserta warga Sudan sebanyak 17 orang. Pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia ini dengan tema *International Training Workshop on Quality Control and Management on Fisheries Industries*, dalam pelatihan ini sendiri para peserta belajar mengelola dan megembangkan potensi perikanan agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sudan sendiri, selain itu pelatihan ini dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Sudan dan Indonesia hal ini diungkapkan oleh Siti Nugraha Mauludia selaku Direktur Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Indonesia pada pembukaan kegiatan praktik lapangan tersebut, yang diadakan di Pekalongan (https://pekalongankota.go.id/berita/warga-sudan-belajar-perikanan-di-pekalongan di akses pada 25 Mei 2017)

Kemudian pada acara *International Training Program for African Countries on Marine Fisheries* yang dilaksanakan 9-14 Mei 2011 di Balai Budidaya Air Payau Sitobondo, Sudan juga mengirimkan warganya dalam training tersebut. Dimana Indonesia melakukan pelatihan tersebut untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Sudan hal tersebut dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat saat itu Sharif C Sutardjo

(http://www.neraca.co.id/article/30361/kerjasama-ekonomi-bilateral-sudan-berguru-budidaya-perikanan-ke-indonesia di akses pada 25 Mei 2017).

Dalam kerjasama ini Indonesia sangat konsisten untuk meningkatkan kerjasama terutama bidang Kelautan dan Perikanan. Sebagai implementasinya dalam kerjasama di antara kedua negara, Indonesia mengundang Sudan untuk belajar banyak mengenai perikanan budidaya di Indonesia. Di mana pada *International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pasific and African Countries* yang dilaksanakan 23-30 Mei 2011 di Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi, Sudan mengirimkan 5 peserta. Kemudian pada *International Training Program for Asian, Pacific and African Countries* yang dilaksanakan pada tanggal 7-15 Mei 2012 di tempat yang sama, Sudan juga mengirimkan wakilnya dalam hal ini dilakukan oleh Indonesia dan Sudan untuk meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara. Selama pelatihan para peserta berkesempatan untuk mempelajari metode-metode efektif dalam budidaya ikan air tawar yang berguna untuk meningkatkan kualitas produksi komoditas perikanan agar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan (http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia---Sudan-Meningkatkan-Kerjasama-Sektor-Perikanan.aspx di akses pada 25 Mei 2017).

Kemudian pada 16 Februari 2015 Indonesia dan Sudan melakukan kerjasama dalam bidang perikanan dan pembudidayaan yang dibentuk dalam kerjasama perikanan dan kelautan dan dikenal dengan *Memorandum of Understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Livestock, Fisheries and Rangelands of*

The Republic of The Sudan On Fisheries and Aquaculture Cooperation. Indonesia dan Sudan membuat dan menyepakati *MoU* ini pada tanggal 16 Februari 2015. Pertimbangan lahirnya nota kesepahaman atau *MoU* karena untuk mewujudkan kerjasama yang baik dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Sudan serta dengan rakyatnya. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama di bidang perikanan yang telah berakhirnya kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan dalam Kerjasama Kelautan dan Perikanan, yang ditandatangani di Khartoum, Sudan pada tanggal 24 Maret 2007 yang telah habis masa berlakunya (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5638_SDN-2015-0026.pdf diakses pada 25 Mei 2017).

MoU tentang Kerjasama Perikanan dan Budidaya ini yang disepakati berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui melalui persetujuan secara tertulis antara para pihak. *MoU* ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Sjarief Widjaja, serta Menteri Negara Pada Kementerian Luar Negeri Sudan Obiedalla Mohamed Obiedalla Hamdan pada 16 Februari 2015.

Dalam kedua kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Sudan dimana dalam kedua kerjasama ini memiliki persamaan yaitu dalam kerjasama pada tahun 2007 seperti dalam pengembangan pasca panen, investasi, perdagangan dan pemasaran produk perikanan, lalu terdapat pelatihan pendidikan dan penyuluhan tentang perikanan laut dan akuakultur, serta adanya pertukaran kunjungan pejabat, ahli, dan informasi. Sedangkan untuk tahun kerjasama pada tahun 2015 yaitu pasca panen, pengelolaan dan pemasaran produk-produk perikanan, promosi pemasaran dan investasi dibidang perikanan dan budidaya, pengembangan

kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia diantara kedua belah pihak, penelitian dan pertukaran para ahli/ ilmuan/ pejabat pemerintah, pertukaran data dan informasi. Adapun perbedaan dalam kerjasama ini yaitu pada tahun 2007 terdapat pengembangan akuakultur, pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan, serta pengelolaan perikanan laut dan pesisir. Sedangkan dalam kerjasama tahun 2015 yaitu adanya tindakan inspeksi dan karantina, serta dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab berbeda dengan tahun 2007 yaitu terdapat pengelolaan di pesisir juga akan tetapi untuk tahun 2015 tidak ada.

Dan dari kedua *MoU* yang telah dilakukan oleh kedua negara yaitu terkait penelitian, pendidikan dan penyuluhan tentang perikanan laut dan akuakultur, pertukaran kunjunganpara ahli/ ilmuan/ pejabat pemerintah dan informasi, pengembangan pasca panen, investasi, perdagangan dan pemasaran produk perikanan

Pelatihan yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan pertimbangan yang bersifat politis dan citra negara Indonesia yang lebih positif. dimana untuk meningkatkan kerjasama dengan para pihak di berbagai bidang perikanan dan budidaya atas dasar kesetaraan dan saling menghormati seperti yang dikatakan oleh Freddy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat saat itu bahwa kerjasama ini untuk pembangunan kelautan dan perikanan serta pembangunan ekonomi Indonesia juga dalam acara kunjungannya ke Sudan pada 22-24 Maret 2007 (http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-

--Sudan-Meningkatkan-Kerjasama-Sektor-Perikanan.aspx di akses pada 26 Mei 2017).

Dalam hal ini Indonesia melakukan dengan pendekatan kemitraan melalui cara berbagi pengalaman, setiap program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada negara penerima dan hendaknya mampu mengubah persepsi atau kebijakan suatu negara terhadap Indonesia menjadi semakin positif. Hal tersebut juga menguntungkan bagi kepentingan Indonesia, dimana bantuan Indonesia yang diberikan dalam bentuk hibah dan berbagai bentuk pelatihan seperti dibidang perikanan adalah untuk kepentingan dari Indonesia sendiri (https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/300/236 di akses pada 26 Mei 2017).

Sama hal dengan kerjasama yang sebelumnya yaitu dalam kerjasama kelautan dan perikanan dimana kepentingan dari Sudan melakukan kerjasama dalam bidang perikanan dengan Indonesia karena untuk meningkatkan pembangunan perikanan dan ekonomi Sudan dengan dilakukannya lagi kerjasama tentang perikanan dan budidaya antara Indonesia dan Sudan pada tahun 2015, dimana sudan melakukan berbagai pelatihan yang diberikan oleh Indonesia dalam perikanan dengan mengirimkan warganya untuk mengikuti pelatihan tersebut agar Sudan memiliki tenaga ahli dalam bidang perikanan yang berkualitas baik dan mengembangkan sektor perikanan yang memiliki potensi yang baik yang dimiliki oleh Sudan hal tersebut di ungkapkan oleh Freddy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan yang mejabat saat itu dan memiliki pemikiran yang sama dengan Menteri Sumberdaya Hewan dan Perikanan Sudan yaitu Galwak Deng Garang.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama Indonesia dengan Sudan dalam bidang perikanan, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian lainnya yang membahas tentang kerjasama Indonesia dalam bidang perikanan yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang telah dilakukan oleh (Puji Lestari) yang berkaitan dengan masalah yang diambil ini yang berjudul (*Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Vietnam Di Bidang Perikanan Tahun 2010-2012*) yang dibuat dalam Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 1, No 1, tahun 2014 Universitas Riau, Riau.

Dalam karya tulis tersebut yang bersangkutan dengan masalah, penelitian menjelaskan tetang apa saja motivasi - motivasi yang dilakukan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Vietnam. Salah satu contoh motivasi yang dipaparkan dalam karya tulis ini yaitu untuk kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Vietnam dibidang Perikanan karena untuk mencegah *IUU Fishing*. Dimana dalam upaya pencegahan *IUU Fisihing* telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia karena yang menjadi latar belakang terjadinya *illegal fishing* itu bermacam-macam seperti diantaranya industri perikanan Vietnam tanpa pasokan ikan yang cukup akan berhenti, sehingga upaya yang dilakukan oleh Vietnam untuk mencukupi kebutuhan tersebut seringkali dilakukan dengan mencuri ikan Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari dengan penelitian ini ialah, dilihat dari kerjasama yang dilakukan Indonesia masih dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan Vietnam dan dalam kerjasama tersebut Indonesia langsung memfokuskan untuk *IUU Fisihing (Illegal Unereported Unregulated Fishing)* karena apa yang dilakukan oleh Vietnam dengan mencuri ikan Indonesia sehingga dilakukannya kerjasama tersebut agar Indonesia dapat memasok ikan ke Vietnam, dengan meningkatkan ekspor perikanan Indonesia.

Penelitian yang lainnya membahas tentang masalah Kebijakan Indonesia dalam bidang perikanan yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang telah dilakukan oleh, (Nadya Eka Putri dan Indra Pahlawan) yang berkaitan dengan masalah yang diambil ini yang berjudul (*Kebijakan RI Melakukan Kerjasama Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dengan Thailand)* yang dibuat dalam jurnal Online Mahasiswa (Jom) Fisip Volume 1, No 2, tahun 2014 Universitas Riau, Riau.

Dalam karya tulis tersebut bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang kebijakan Indonesia dalam sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut salah satunya dalam mengatasi *illegal fishing* yang sering kali di alami oleh Indonesia karena memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah tersebut bertolak belakang dengan kondisi kelestarian yang tercemar akibat aktivitas penangkapan ikan secara berlebih karena penerapan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pembatasan *illegal fishing* belum begitu mengikat. Kebijakan yang belum maksimal ini mengakibatkan perlindungan terhadap kekayaan potensi kelautan wilayah perairan Indonesia mengalami suatu hambatan.

Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah kurangnya sumber daya manusia dan upaya mengoptimalkan penggunaan teknologi yang memadai dalam hal pembuatan peraturan perikanan baru serta pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal asing khususnya kapal Thailand yang beroperasi di laut territorial Indonesia.

Perbedaan penelitian Nadya Eka Putri dan Indra Pahlawan dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih membahas pada kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing*, selain itu dalam penelitiannya menyangkut kepentingan Indonesia melakukan kerjasama sumber daya kelautan dan perikanan dengan Thailand, dan upaya dalam penegakan hukum serta keamanan di wilayah perairan Indonesia untuk mengantisipasi operasi *illegal fishing* kapal ikan asing bagi perkembangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Perbedaan lainnya dari penelitian Nadya dan Indra yaitu negara yang menjadi objek penelitian yaitu Indonesia dan Thailand.

Penelitian yang lainnya membahas tentang masalah kerjasama Indonesia dalam bidang perikanan yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh (Afrizal Firman) yang berjudul (*Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Memanfaatkan Potensi Laut Di Maluku)* yang dibuat pada tahun 2010 di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Dalam karya tulis tersebut bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku dan dilihat dari persepsi Indonesia yaitu berkaitan dengan apa yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku karena perikanan Maluku

masuk dalam kategori yang kaya dengan banyak potensi laut yang luas serta yang menjadi sorotan utama bagi Indonesia melakukan kerjasama ini karena potensi laut yang ada di Maluku memiliki ladang sektor perikanan yang kaya bagi pembangunan ekonomi Maluku khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Perbedaan Penelitian Afrizal dengan penelitian ini ialah jika dalam penelitian Afrizal yang dibahas yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia untuk memanfaatkan potensi laut di Maluku, dimana kerjasama tersebut yang dilakukan langsung dalam pengelolaan laut dan perikanan yang ada di Maluku yang merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang langsung menjadi objek penelitian. perbedaan lain dari penelitian Afrizal yaitu negara yang menjadi objek penelitian ialah Indonesia dan Australia dan laut di Maluku. Satu perbedaannya lagi yaitu, penelitian Afrizal tidak terfokus pada perikanan saja tetapi pada laut yang ada di Maluku juga yang dijadikan objek pariwisata oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: "***Kerjasama Indonesia dan Sudan Dalam Bidang Perikanan (2007-2015)".***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang sudah di pelajari oleh peneliti sebagai bekal di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

   Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain,

selain itu dalam politik luar negeri terdapat kumpulan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Serta politik luar negeri sendiri merupakan penjabaran politik nasional sedangkan politik nasional merupakan penjabaran dari kepentingan nasional, dan matakuliah ini membantu peneliti mengenai politik luar negeri yang dilakukan dengan aturan-aturan antara dua negara dan hubungan bilateral dua negara.

2. HI di Timur Tengah dan Afrika

   Mata kuliah membantu peneliti memahami bagaimana kemajuan Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika hanya saja penelitian ini lebih condong pada Hubungan Internasional di Afrika.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana kerjasama Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan (2007-2015)?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan pada tahun 2007-2015?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dan Sudan dalam kerjasama dibidang perikanan tahun 2007-2015?
3. Apa saja hasil yang telah diperoleh dari kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan 2007-2015?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Sudan maka mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini lebih fokus terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Sudan sebagai objek penelitian dan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan. Karena hubungan kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan sudah terjalin sejak lama maka dari itu peneliti lebih fokus terhadap waktu penelitian yaitu mulai dari tahun 2007-2015. Peneliti memilih pembatasan waktu penelitian mulai tahun 2007 karena mengambil momentum saat Indonesia dan Sudan melakukan penandatangan kerjasama tentang kerjasama kelautan dan perikanan, kemudian tahun 2012 adanya kunjungan kehormatan dari delegasi Sudan ke Indonesia untuk melakukan perpanjangan kerjasama dan tahun 2013 dilakukannya kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang perikanan, serta untuk tahun 2015 sebagai batas terakhir penelitian karena kerjasama tersebut dilakukan perpanjangan dan mengambil momentum saat penandatangan kerjasama tentang perikanan dan budi daya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan pada tahun 2007-2015 dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam kerjasama yang dilakukan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan dilakukannya perpanjangan kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan tahun 2007-2015.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dan Sudan dalam kerjasama dibidang perikanan tahun 2007-2015.
3. Untuk mengetahui apa saja hasil yang telah diperoleh dari perpanjangan kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan tahun 2007-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua bagian kegunaan, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan para penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu acuan bahan pembelajaran serta memperkaya sumber informasi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman,

wawasan serta bahan tambahan informasi hubungan internasional, kerjasama internasional, analisis politik luar negeri dan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional khususnya respon Indonesia yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik tentang kerjasama Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan tahun 2007-2015 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait topik ini. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan hubungan internasional

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu, dan rekomendasi bagi para peneliti hubungan internasional dan juga masyarakat yang ingin mengetahui kerjasama antara Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang ilmu hubungan internasional.
3. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi bagi penstudi hubungan internasional dan umum.